



KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM DAN HUMAS  
TAHUN 2016

PERIODE  
FEBRUARI  
2016

# TELAAHAN TREN ISU PERTANIAN



Simpt 2.

Bab 1.

# KATA PENGANTAR

Laporan **Telaahan Isu Pertanian** disusun sebagai upaya untuk monitoring dan antisipasi isu-isu yang terkait dengan sektor pertanian secara umum ataupun Kementerian Pertanian secara khusus, yang dilakukan melalui identifikasi dan penelusuran berita di media. Selain itu, laporan ini disusun untuk mengevaluasi dan menyiapkan informasi serta bahan masukan dalam upaya pengelolaan isu.

Laporan Telaahan Tren Isu bulan Februari 2016, merupakan objek telaahan pada berita-berita dari surat kabar nasional yang telah dimonitor melalui kegiatan Kliping Berita dan Pendapat Pertanian selama kurun waktu 1 - 29 Februari 2016. Berdasarkan telaahan terhadap objek yang telah ditetapkan tersebut, ditemukan isu yang paling mengemuka adalah **tata niaga kelapa sawit mentah (CPO)**.

Pemerintah Prancis berencana memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak regresif terhadap crude palm oil (CPO). Merespons hal tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah mengadakan negosiasi untuk membatalkan aturan tersebut. Pemberlakuan pajak Prancis harus dicegah sebab akan sangat merugikan petani sawit di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016

Biro Umum dan Humas

630  
1312  
t



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. TUJUAN	3
1.3. METODE TELAAHAN	3
<b>2. TELAAHAN TREN ISU HARIAN</b>	<b>5</b>
2.1. SENIN, 1 FEBRUARI 2016	5
2.2. SELASA, 2 FEBRUARI 2016	7
2.3. RABU, 3 FEBRUARI 2016	8
2.4. KAMIS, 4 FEBRUARI 2016	10
2.5. JUMAT, 5 FEBRUARI 2016	12
2.6. SELASA, 9 FEBRUARI 2016	13
2.7. RABU, 10 FEBRUARI 2016	15
2.8. KAMIS, 11 FEBRUARI 2016	17
2.9. JUMAT, 12 FEBRUARI 2016	18
2.10. SENIN, 15 FEBRUARI 2016	20
2.11. SELASA, 16 FEBRUARI 2016	22
2.12. RABU, 17 FEBRUARI 2016	23
2.13. KAMIS, 18 FEBRUARI 2016	25
2.14. JUMAT, 19 FEBRUARI 2016	27
2.15. SENIN, 22 FEBRUARI 2016	28
2.16. SELASA, 23 FEBRUARI 2016	30
2.17. RABU, 24 FEBRUARI 2016	32
2.18. KAMIS, 25 FEBRUARI 2016	33
2.19. JUMAT, 26 FEBRUARI 2016	35
2.20. SENIN, 29 FEBRUARI 2016	36
<b>3. SIMPULAN TELAAHAN TREN ISU</b>	<b>39</b>
3.1. TOP ISU PERTANIAN	39
3.2. SIMPULAN	40



# 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam proses kegiatan suatu organisasi atau institusi, timbulnya suatu isu merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Isu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik, pemerintah, dan organisasi lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau institusi. Isu juga dapat diartikan sebagai titik konflik antara institusi dan publiknya (internal maupun eksternal).

Kementerian Pertanian sebagai institusi pemerintah melibatkan banyak pihak dalam kegiatannya, baik secara intern maupun ekstern, sehingga potensi munculnya isu cukup besar. Pemicu terjadinya isu dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain rencana munculnya kebijakan baru, opini tertentu yang muncul di media, perkembangan yang kompetitif, publikasi hasil penelitian, ataupun hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk itu, manajemen isu perlu dilakukan dalam kegiatan humas di lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan manajemen isu, Humas Kementerian Pertanian melakukan identifikasi, evaluasi, pengelolaan, dan respon isu sebelum menjadi "public knowledge", dalam upaya mendukung terwujudnya citra positif Kementerian Pertanian. Melalui pelaksanaan manajemen isu, sebuah lembaga dapat mendeteksi timbulnya isu sejak dini sehingga dapat mempersiapkan upaya antisipasinya, termasuk mengkomunikasikannya dengan publik. Melalui deteksi isu sejak dini tersebut, kita dapat mendeteksi pula berbagai *opportunity* atau peluang yang terjadi dengan mengurangi risiko isu menjadi krisis.

Sebagai bagian dari proses Manajemen Isu di lingkup Kementerian Pertanian, Biro Umum dan Humas khususnya pada Bagian Hubungan Masyarakat, yaitu di Sub Bagian Analisis Pendapat Umum (APU) telah melaksanakan Telaahan Tren Isu Pertanian. Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah isu pertanian yang mengemuka di berbagai media cetak, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dengan pelaksanaan Telaahan Tren Isu Pertanian ini, Humas Kementerian Pertanian berupaya dapat mendeteksi isu-isu pertanian yang mengemuka dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun strategi yang dapat menekan potensi terjadinya krisis.

## Tujuan

- Monitoring dan antisipasi isu-isu yang terkait dengan sektor pertanian secara umum ataupun Kementerian Pertanian secara khusus, melalui identifikasi dan penelusuran berita di media.
- Menelusuri tokoh-tokoh yang mengeluarkan pernyataan seputar isu terkait, baik dari intern (jajaran pimpinan Kementerian Pertanian) ataupun ekstern (institusi pemerintah lainnya dan pemangku kepentingan).
- Mengevaluasi dan menyiapkan bahan dalam upaya dan strategi antisipasi agar isu tidak berkembang menjadi krisis.

## Metode Telaahan

Telaahan Tren Isu Pertanian dilakukan dengan merekapitulasi isu-isu pertanian yang dibahas dalam surat kabar nasional. Melalui rekapitulasi tersebut ditentukan top isu, yaitu isu yang paling sering dibahas dalam periode telaahan.

Objek Telaahan Tren Isu Pertanian adalah berita-berita berbentuk *hardnews* yang dimuat dalam surat kabar nasional maupun daerah yang telah termonitor melalui kegiatan **Kliping Berita dan Pendapat Pertanian**.

Rincian pelaksanaan kegiatan Telaahan Tren isu Pertanian sebagai berikut.

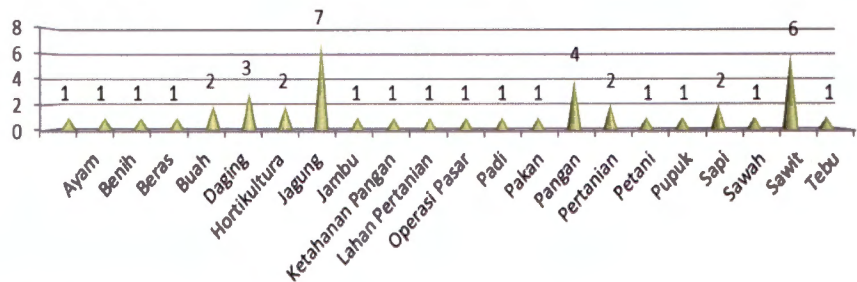
- Telaahan Tren Isu Harian
  - rekapitulasi dan identifikasi pemberitaan pertanian yang telah termonitor dalam kegiatan "**Kliping Berita dan Pendapat Pertanian**" melalui proses *coding* dengan menggunakan aplikasi *microsoft access*.
    - » Menelaah isu-isu pertanian yang mengemuka.
    - » Berdasarkan rekapitulasi, dipilih top isu, yaitu isu yang paling mengemuka pada hari tersebut. Intisari atas pemberitaan terkait top isu yang mengandung unsur 5W dan 1H (what, who, where, when, why, dan how) selanjutnya dirumuskan.
    - » Mendata berita-berita terkait top isu dan menentukan dampak pencitraan terhadap Kementerian Pertanian. Kategori dampak pencitraan terdiri **positif (+)**, yaitu berita yang memiliki dampak pencitraan positif terhadap Kementerian Pertanian); **negatif (-)**, yaitu berita yang memiliki dampak pencitraan negatif terhadap Kementerian Pertanian; dan **netral (N)**, yaitu isu yang memberikan dampak pencitraan yang netral atau berimbang terhadap Kementerian Pertanian. Berdasarkan data tersebut, membuat pie chart "Kategori Pemberitaan berdasarkan Dampak Pencitraan"
- Telaahan Tren Isu Bulanan
  - » Berdasarkan hasil rekapitulasi dan statistik selama sebulan, ditentukan isu-isu yang paling mengemuka
  - » Menyusun simpulan telaahan tren isu



## 2. TELAAHAN TREN ISU HARIAN

### 2.1. SENIN, 1 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 1 Februari 2016<sup>1</sup>, isu **jagung** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 7 berita. Topik yang mengemuka adalah jagung impor diserap Bulog.



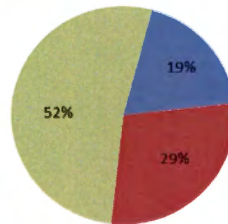
#### Intisari Pemberitaan

Kemendag mengatakan 445.500 ton jagung impor milik swasta yang tertahan di beberapa pelabuhan akan dibeli seluruhnya oleh Perum Bulog. Sebanyak 25% jagung impor itu akan dialokasikan untuk peternak rakyat. Jagung-jagung tersebut akan disalurkan ke peternak dengan harga wajar, sekitar Rp3.500/kg. (*Media Indonesia, 1 Februari 2016*)

Perum Bulog membeli jagung impor milik importir yang tertahan di sejumlah pelabuhan di Indonesia sebanyak 445.500 ton. Jagung ini akan dijual langsung ke pengusaha pakan ternak untuk menekan harga jagung, pakan ternak, daging ayam dan telur ayam. Bulog menyepakati pembelian jagung impor itu setelah Mendag Thomas Lembong memfasilitasi pertemuan Bulog dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), para importir, dan para peternak. (*Kompas, 1 Februari 2016*)

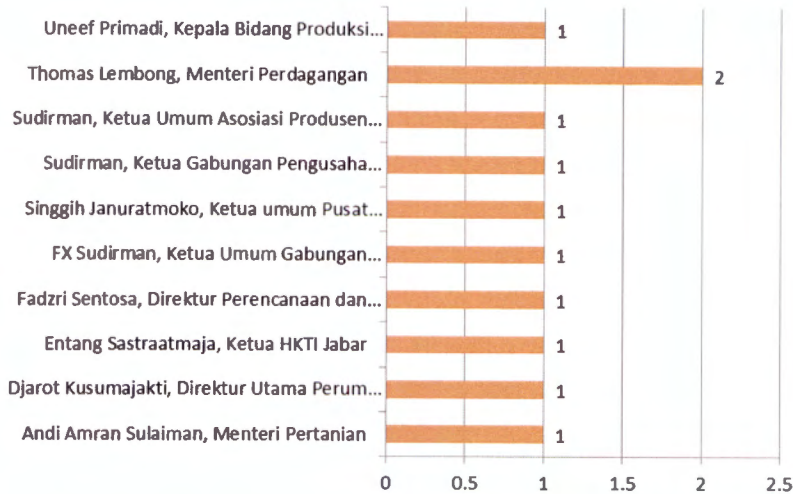
#### Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 42 berita pertanian, yaitu 22 berita (52%) bertendensi positif, 12 berita (29%) yang bertendensi netral, dan, sedangkan 8 berita (19%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah jagung impor diserap Bulog.



<sup>1</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republik, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

## Narasumber



Dalam topik jagung impor, setelah pertemuan antara Bulog, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), para importir, dan para peternak yang difasilitasi Mendag Thomas Lembong disepakati jagung impor milik importir yang tertahan di sejumlah pelabuhan di Indonesia sebanyak 445.500 ton akan disalurkan ke peternak dengan harga wajar, sekitar Rp3.500/kg.

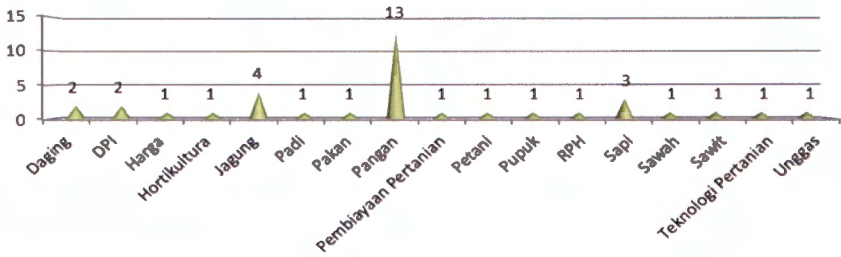
## Simpulan Pemberitaan

Isu **jagung** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 7 berita. Topik yang mengemuka adalah jagung impor diserap Bulog dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 22 berita (62%).



## 2.2. SELASA, 2 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 2 Februari 2016<sup>2</sup>, Isu **pangan** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 13 berita. Topik yang mengemuka adalah pembentukan badan pangan.



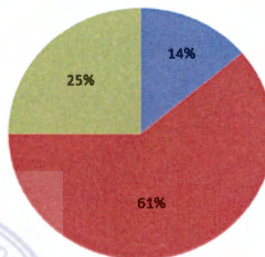
### Intisari Pemberitaan

Kalangan petani Indonesia mendesak pemerintah untuk mempercepat pembentukan Badan Pangan Nasional agar kebijakan pangan di Tanah Air lebih komprehensif. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia menyampaikan, pemerintah harus segera merealisasikan BPN sesuai dengan UU Pangan No. 18/2012 terutama untuk meredakan gejolak harga bahan pangan pokok yang kerap terjadi pada awal tahun ini. **(Bisnis Indonesia, 2 Februari 2016)**

Kenaikan harga pangan beberapa waktu terakhir membuat masyarakat resah. Pemerintah juga mengerahkan segala upaya untuk menstabilkan harga, namun belum menemui hasil. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia mendesak pemerintah segera membentuk badan pangan nasional sesuai dengan perintah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Langkah ini merupakan cara untuk mengintegrasikan kebijakan pangan di Indonesia yang selama ini parsial. Selama ini Kementan, Kemendag dan Bulog berjalan sendiri-sendiri. **(Rakyat Merdeka, 2 Februari 2016)**

### Tendensi Pemberitaan

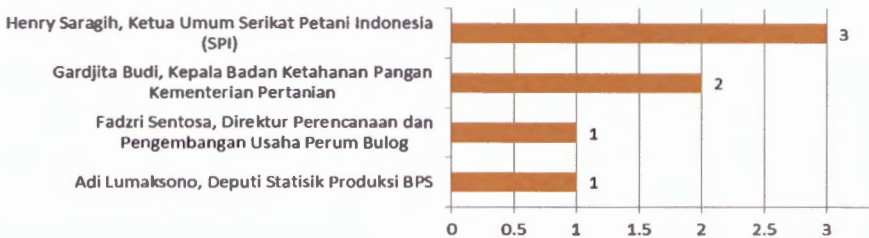
Berdasarkan 36 berita pertanian, yaitu 22 berita (61%) yang bertendensi netral, 9 berita (25%) bertendensi positif, sedangkan 5 berita (14%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah badan pangan.



2 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



## Narasumber



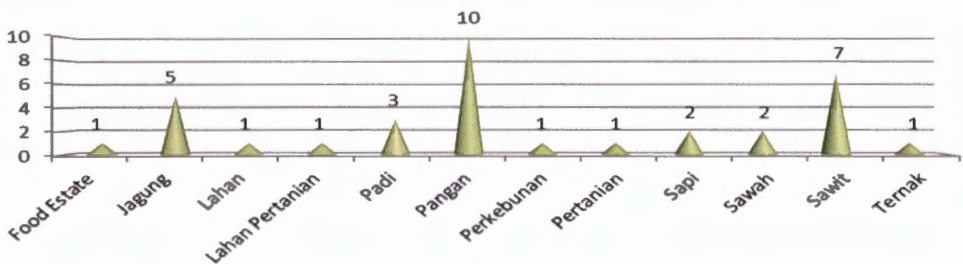
Dalam topik pembentukan badan pangan, kalangan petani Indonesia mendesak pemerintah untuk mempercepat pembentukan Badan Pangan Nasional agar kebijakan pangan di Tanah Air lebih komprehensif. Langkah ini merupakan cara untuk mengintegrasikan kebijakan pangan di Indonesia yang selama ini parsial.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **pangan** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 13 berita. Topik yang mengemuka adalah pembentukan badan pangan dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 22 berita (61%).

## 2.3. RABU, 3 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 3 Februari 2016<sup>3</sup>, isu **pangan** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 10 berita. Topik yang mengemuka adalah harga pangan.



3 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



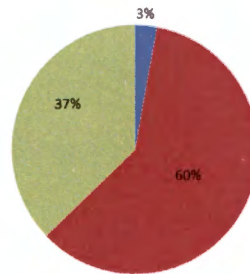
## Intisari Pemberitaan

Harga sejumlah komoditas bahan pangan masih naik. Pasokan dari daerah produsen menurun. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jaktim, harga cabai merah besar naik Rp10.000-Rp15.000/kg. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kemendag harga cabai merah besar nasional mulai meningkat sejak Minggu lalu. **(Kompas, 3 Februari 2016)**

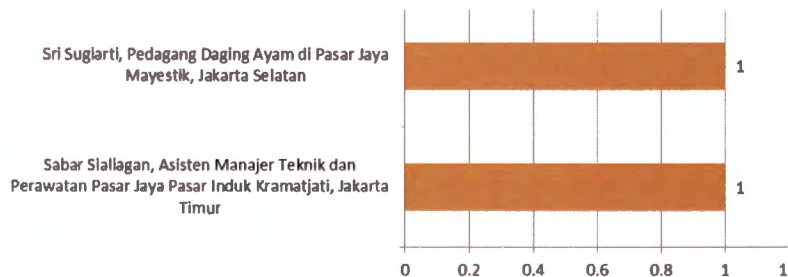
Salah satu harapan terbesar publik kepada Presiden Jokowi adalah, sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, Jokowi berani dan mampu melakukan terobosan atas berbagai persoalan klasik bangsa ini yang sudah berjalan bertahun-tahun. Di titik ini, sudah sepantasnya kita menagih kepada Presiden Jokowi untuk segera mencari terobosan untuk menggugung tradisi harga bahan makanan naik pada awal tahun. Cerita lama seperti ini harus mampu dihentikan atau paling tidak dikurangi pengaruh negatifnya. **(Bisnis Indonesia, 3 Februari 2016)**

## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 35 berita pertanian, yaitu 21 berita (60%) yang bertendensi netral, 13 berita (37%) bertendensi positif, sedangkan 1 berita (3%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah harga pangan.



## Narasumber



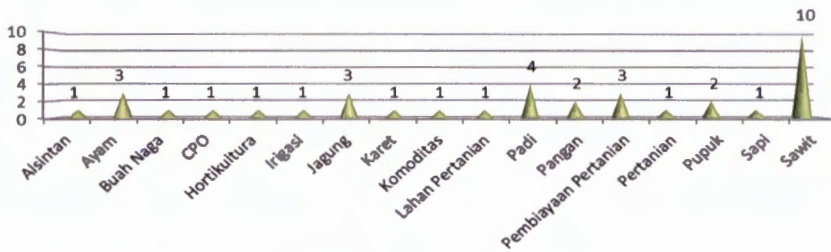
Dalam topik harga pangan, Harga sejumlah komoditas bahan pangan masih tinggi. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kemendag harga cabai merah besar nasional mulai meningkat sejak Minggu lalu.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **pangan** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 10 berita. Topik yang mengemuka adalah harga pangan dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 22 berita (61%).

## 2.4. KAMIS, 4 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 4 Februari 2016<sup>4</sup>, Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 10 berita. Topik yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif.



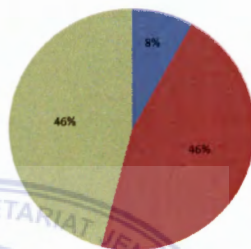
### Intisari Pemberitaan

Kendati volume ekspor ke Perancis secara langsung terbilang cukup kecil, rencana pemerintah Perancis menerapkan pajak tambahan/bea masuk CPO akan berdampak besar bagi pasar komoditas tersebut secara keseluruhan. Ketua Gapki Joko Supriyono mengatakan informasi mengenai rencana kebijakan Perancis itu saja telah memberikan sentimen negatif terhadap pasar secara keseluruhan. Apalagi jika negara lainnya mengikuti langkah serupa. **(Bisnis Indonesia, 4 Februari 2016)**

Pemerintah Indonesia akan mengadukan Perancis ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) apabila kebijakan pajak progresif untuk impor minyak sawit mulai diterapkan 2017 mendatang. Protes tersebut sangat memungkinkan karena kebijakan pajak tersebut diberlakukan diskriminatif atau hanya untuk komoditas minyak sawit dan tidak untuk minyak nabati lainnya. Namun demikian, Indonesia akan menempuh langkah diplomasi karena saat ini kebijakan itu masih dalam proses penetapan melalui ketentuan perundangan Perancis. **(Investor Daily, 4 Februari 2016)**

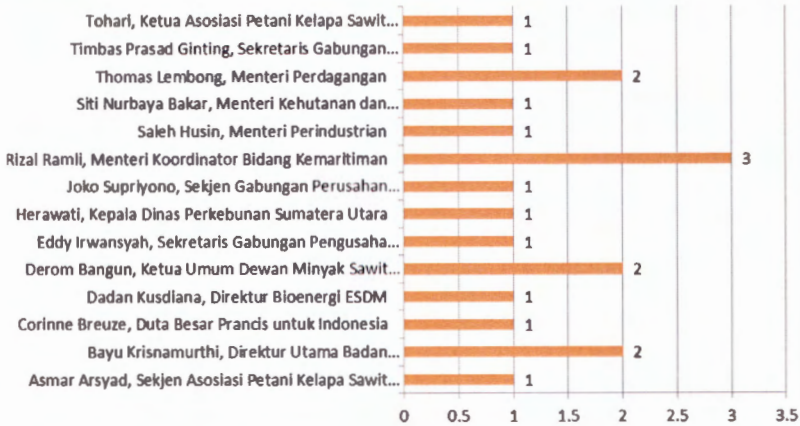
### Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 37 berita pertanian, yaitu 17 berita (46%) bertendensi netral dan 17 berita (46%) yang bertendensi positif, sedangkan 3 berita (8%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif.



4 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

## Narasumber



Dalam topik pengenaan pajak progresif, Kendati volume ekspor ke Perancis secara langsung terbilang cukup kecil, rencana pemerintah Perancis menerapkan pajak tambahan/bea masuk CPO akan berdampak besar bagi pasar komoditas tersebut secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia akan mengadakan Perancis ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) apabila kebijakan pajak progresif untuk impor minyak sawit mulai diterapkan 2017 mendatang. Namun demikian, Indonesia akan menempuh langkah diplomasi karena saat in kebijakan itu masih dalam proses penetapan melalui ketentuan perundangan Perancis

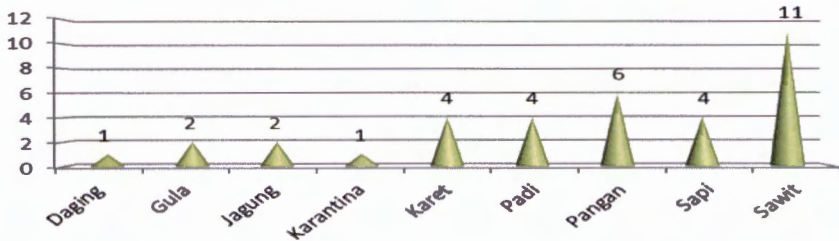
## Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 10 berita. Topik yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif dan netral masing-masing sebanyak 22 berita (46%).



## 2.5. JUMAT, 5 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 5 Februari 2016<sup>5</sup>, Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 11 berita. Topik yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif.



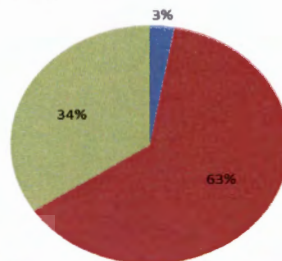
### Intisari Pemberitaan

Pemerintah Perancis berencana memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak regresif terhadap CPO. Merespon hal tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah mengadakan negosiasi untuk membatalkan aturan tersebut. "Apabila tidak ada pembatalan terkait aturan tersebut, kami para petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke Kedutaan Perancis di Indonesia," kata Ketua Umum Apkasindo, Anizar Simanjatak. **(Republika, 5 Februari 2015)**

Pemerintah menolak dengan tegas rencana pemerintah Perancis yang memberlakukan pajak untuk CPO. Kebijakan ini akan mematikan industri sawit Indonesia. Kemendag pun kirim surat protes. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai, rencana pengenaan pajak progresif untuk semua produk berbasis CPO merupakan kebijakan yang tidak masuk akal. **(Rakyat Merdeka, 5 Februari 2015)**

### Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 35 berita pertanian, yaitu 22 berita (63%) bertendensi netral dan 12 berita (34%) yang bertendensi positif, sedangkan 1 berita (3%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif.



<sup>5</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



## Narasumber



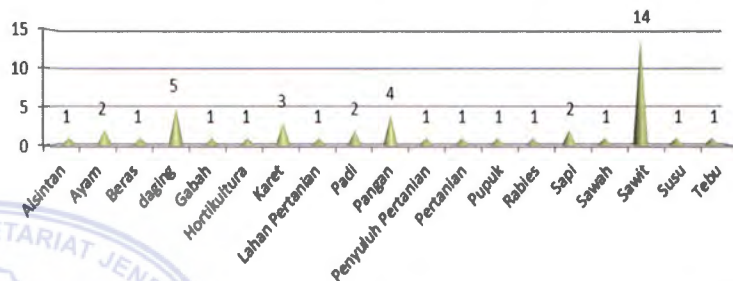
Dalam topik pengenaan pajak progresif, Pemerintah Perancis berencana memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak regresif terhadap CPO. Merespon hal tersebut, Pemerintah menolak dengan tegas. Kebijakan ini akan mematikan industri sawit Indonesia. Kemendag pun kirim surat protes.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 11 berita. Topik yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 22 berita (63%).

## 2.6. SELASA, 9 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 9 Februari 2016<sup>6</sup>, Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 14 berita. Topik yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif.



6 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daiy, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

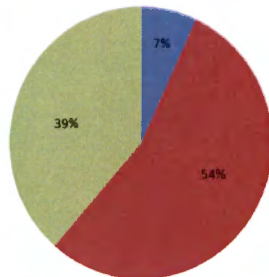
## Intisari Pemberitaan

Kemendag menilai rencana Perancis menerapkan pajak progresif terhadap minyak kelapa sawit melanggar prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) tahun 1994. Terkait itu, Kemendag meminta rencana tersebut dibatalkan. Menurut Mendag Thomas Lembong, penerapan pajak progresif terhadap CPO itu akan menciptakan diskriminasi harga dan merugikan Indonesia. **(Kompas, 9 Februari 2016)**

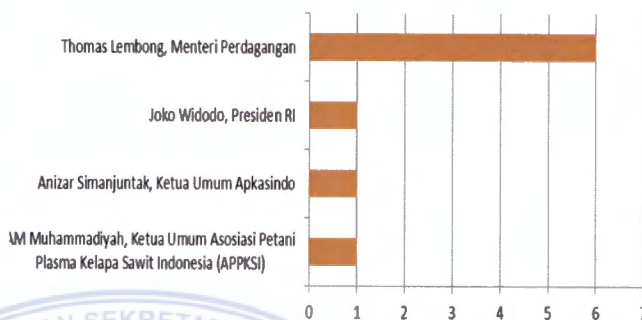
Kemendag meminta agar Pemerintah Perancis tidak mengadopsi Amandemen No. 367 yang dibuat oleh parlemen Negeri Mode tersebut berkaitan dengan pajak CPO. Parlemen Perancis pun diimbau agar membatalkan rencana pemberlakuan pajak CPO yang dinaikkan secara progresif mulai 2017. **(Bisnis Indonesia, 9 Februari 2016)**

## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 44 berita pertanian, yaitu 24 berita (54%) bertendensi netral dan 17 berita (39%) yang bertendensi positif, sedangkan 3 berita (7%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif.



## Narasumber



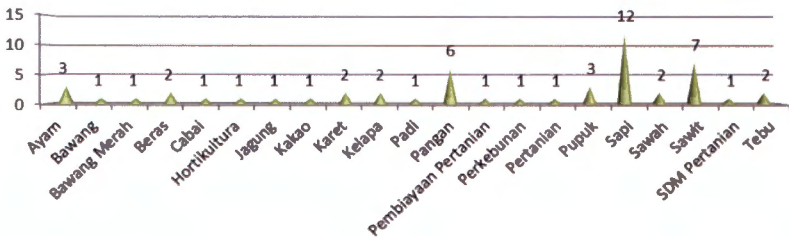
Dalam topik pengenaan pajak progresif, Kemendag menilai rencana Perancis menerapkan pajak progresif terhadap minyak kelapa sawit melanggar prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) tahun 1994. Menurut Mendag Thomas Lembong, penerapan pajak progresif terhadap CPO itu akan menciptakan diskriminasi harga dan merugikan Indonesia.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 14 berita. Topik yang mengemuka adalah pengenaan pajak progresif dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 24 berita (54%).

## 2.7. RABU, 10 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 10 Februari 2016<sup>7</sup>, Isu **sapi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 12 berita. Topik yang mengemuka adalah kapal angkutan ternak.



## Intisari Pemberitaan

Kapal ternak Camara Nusantara I kembali beroperasi untuk kedua kalinya di Februari 2016. Meski kali ini berhasil mengangkut penuh sapi-sapi lokal, harga daging di tingkat konsumen masih melambung tinggi. Pemerintah berpendapat, harga daging sapi paha belakang dianggap normal jika harganya di bawah Rp100 ribu. “Ini agenda jangka panjang, bukan hari ini masuk harga (daging) sapi langsung bisa turun. Yang penting kita memulai dulu” kata Mentan Amran Sulaiman. (**Republika, 10 Februari 2016**)

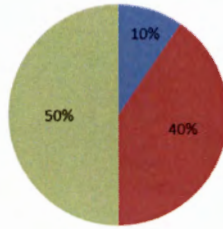
Mentan Amran Sulaiman memastikan, pada pelayaran ketiga ini kapal ternak membawa muatan penuh. Amran mengungkapkan, kapal ternak kali ini berhasil bawa muatan penuh karena pihaknya kini menggandeng 13 perusahaan untuk mengisi muatan. (**Rakyat Merdeka, 9 Februari 2016**)

## Tendensi Pemberitaan

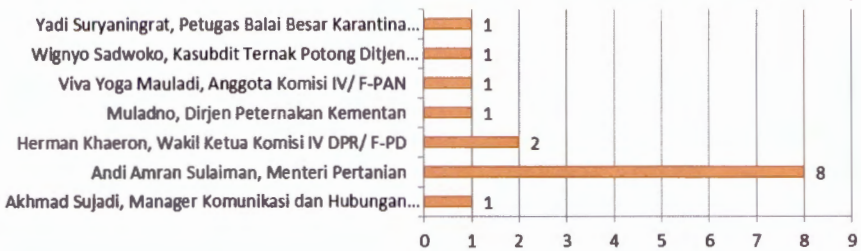
Berdasarkan 52 berita pertanian, yaitu 26 berita (50%) yang bertendensi positif, dan 21 berita (40%) bertendensi netral, sedangkan 5 berita (10%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah kapal angkutan ternak.

7 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan “Kliping Berita Pertanian” dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daiy, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.





## Narasumber



Dalam topik kapal angkutan ternak, Mentan Amran Sulaiman memastikan, pada pelayanan ketiga ini kapal ternak membawa muatan penuh, karena pihaknya kini menggandeng 13 perusahaan untuk mengisi muatan. Menanggapi harga daging sapi yang masih melambung tinggi. Pemerintah berpendapat, harga daging sapi paha belakang dianggap normal jika harganya di bawah Rp100 ribu. "Ini agenda jangka panjang, bukan hari ini masuk harga (daging) sapi langsung bisa turun. Yang penting kita memulai dulu" kata Mentan Amran Sulaiman.

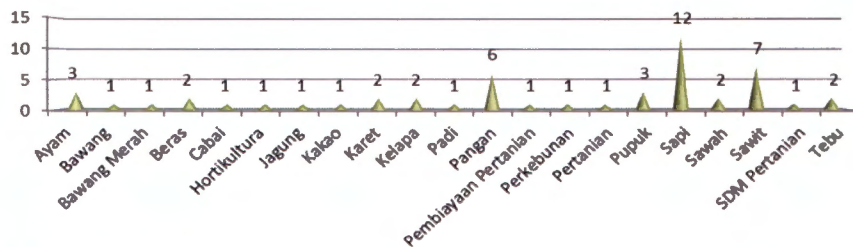
## Simpulan Pemberitaan

Isu **sapi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 12 berita. Topik yang mengemuka adalah kapal angkutan ternak dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 26 berita (50%).



## 2.8. KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 11 Februari 2016<sup>8</sup>, isu **kerja sama** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 12 berita. Topik yang mengemuka adalah penandatanganan MoU Kementan-KPK.



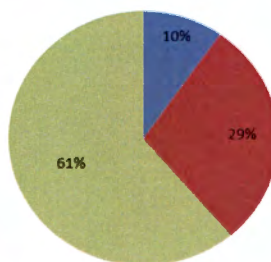
### Intisari Pemberitaan

KPK dan KPPU siap mengawasi kinerja Kementan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Dengan tata kelola yang tepat kedaulatan pangan diharapkan bisa terpenuhi. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, dari kesepakatan antara Kementan dengan KPPU, komisi antirasuah itu lebih luasa mengakses data dan informasi terkait komoditas pangan. **(Bisnis Indonesia, 11 Februari 2016)**

Kementan menyatakan, sektor pangan paling rentan korupsi ketika dibuka jalinan kerjasama dengan rekanan. Irjen Kementan Justan Ridwan Siahaan, menyatakan hal tersebut harus dicegah dengan memperkuat sistem pengawasan. Ketua KPK Agus Raharjo memperingatkan pejabat Kementan agar tak terlibat korupsi pangan. **(Republika, 11 Februari 2016)**

### Tendensi Pemberitaan

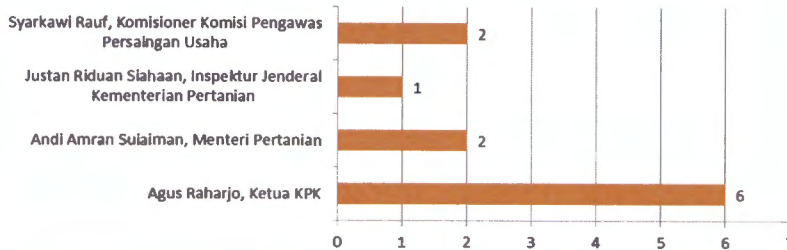
Berdasarkan 52 berita pertanian, yaitu 19 berita (61%) yang bertendensi positif, dan 9 berita (29%) bertendensi netral, sedangkan 3 berita (10%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah penandatanganan MoU Kementan-KPK.



<sup>8</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daiy, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



## Narasumber



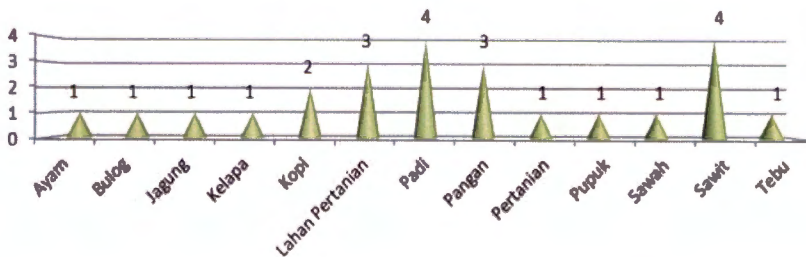
Dalam topik penandatanganan MoU Kementan-KPK, Kementan menyatakan, sektor pangan paling rentan korupsi ketika dibuka jalinan kerjasama dengan rekanan. Irjen Kementan Justan Ridwan Siahaan, menyatakan hal tersebut harus dicegah dengan memperkuat sistem pengawasan. KPK dan KPPU siap mengawasi kinerja Kementan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Dengan tata kelola yang tepat kedaulatan pangan diharapkan bisa terpenuhi.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **kerjasama** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 12 berita. Topik yang mengemuka adalah penandatanganan MoU Kementan-KPK dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 19 berita (61%).

## 2.9. JUMAT, 12 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 12 Februari 2016<sup>9</sup>, isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 4 berita. Topik yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif.



<sup>9</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daj, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



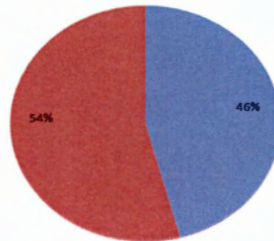
## Intisari Pemberitaan

Sebagai tindak lanjut rencana pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit, Mendag Thomas T. Lembong akan menemui sejumlah pihak di Perancis, termasuk parlemen Perancis. Thomas mengatakan pihaknya telah secara resmi meminta kepada pemerintah dan parlemen Perancis untuk membatalkan Amandemen No. 367 yang mengatur tentang pemberlakuan pajak progresif tersebut. **(Bisnis Indonesia, 12 Februari 2016)**

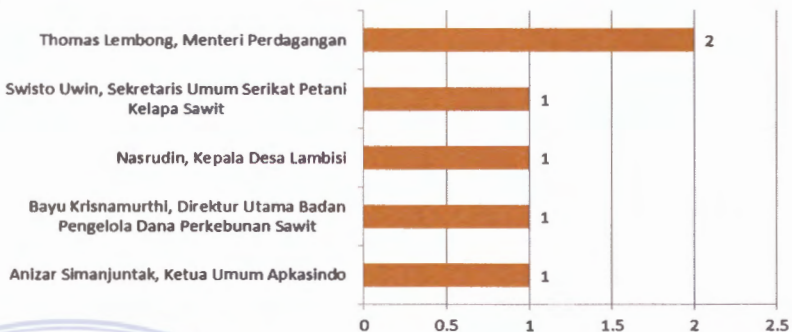
Mendag Thomas Lembong meminta Pemerintah Perancis membatalkan pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit. Pajak tersebut diatur dalam Amanademen No. 367 dan diadopsi Majelis Tinggi Legislatif Perancis pada 21 Januari 2016. Thomas optimistis, pemerintah dan parlemen Perancis mau menjaga hubungan kerjasama perdagangan secara baik dan bersedia mengabulkan permintaan itu. **(Republika, 12 Februari 2016)**

## Tendensi Pemberitaan

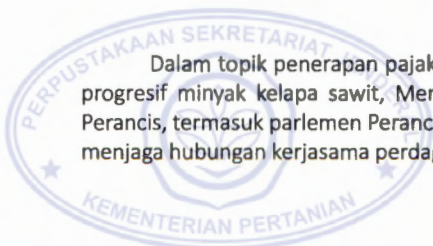
Berdasarkan 24 berita pertanian, yaitu 13 berita (54%) yang bertendensi positif, dan 11 berita (46%) bertendensi netral, sedangkan berita yang bertendensi negative tidak ada (0%). Topik positif yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif.



## Narasumber



Dalam topik penerapan pajak progresif, Sebagai tindak lanjut rencana pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit, Mendag Thomas T. Lembong akan menemui sejumlah pihak di Perancis, termasuk parlemen Perancis. Thomas optimistis, pemerintah dan parlemen Perancis mau menjaga hubungan kerjasama perdagangan secara baik dan bersedia mengabulkan permintaan itu.

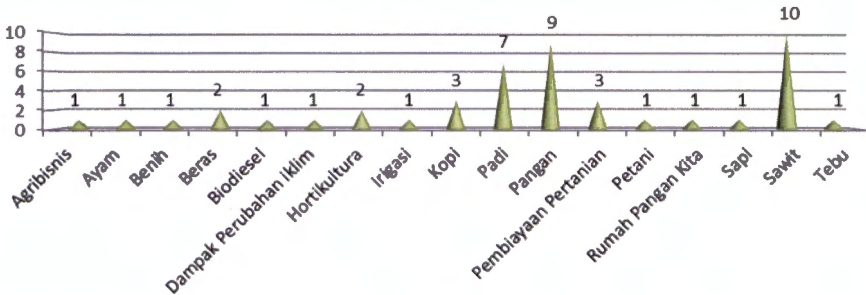


## Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 4 berita. Topik yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 13 berita (54%).

### 2.10. SENIN, 15 FEBRUARI 2015

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 15 Februari 2016<sup>10</sup>, Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 10 berita. Topik yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif.



## Intisari Pemberitaan

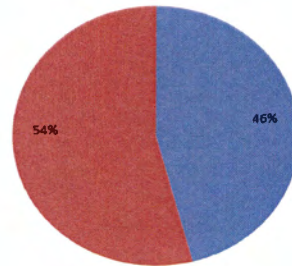
Permintaan Indonesia untuk membatalkan rencana pemberlakuan pajak progresif terhadap produk sawit sejauh ini direspons positif oleh Perancis. Mendag Thomas T. Lembong mengatakan pertemuannya dengan Senator Fraksi Ekologi Perancis Ronan Dantec pada Kamis (11/2) memberikan harapan bagi kelangsungan akses pasar minyak kelapa sawit di Perancis ataupun Uni Eropa. **(Bisnis Indonesia, 15 Februari 2016)**

Mendag Thomas Lembong meminta Pemerintah Perancis membatalkan pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit. Pajak tersebut diatur dalam Amanademen No. 367 dan diadopsi Majelis Tinggi Legislatif Perancis pada 21 Januari 2016. Thomas optimistis, pemerintah dan parlemen Perancis mau menjaga hubungan kerjasama perdagangan secara baik dan bersedia mengabdikan permintaan itu. **(Republika, 12 Februari 2016)**

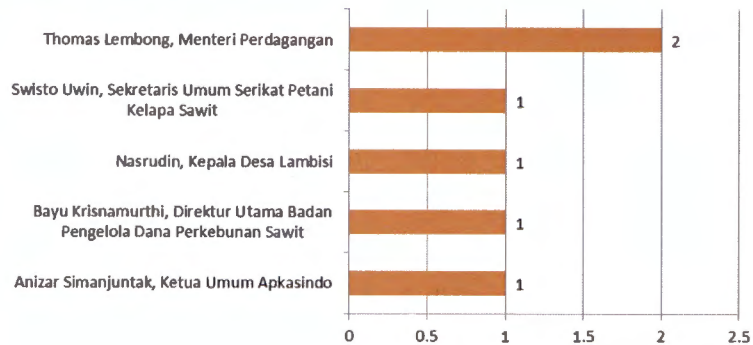
## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 24 berita pertanian, yaitu 13 berita (54%) yang bertendensi positif, dan 11 berita (46%) bertendensi netral, sedangkan berita yang bertendensi negative tidak ada (0%). Topik positif yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif.

<sup>10</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



### Narasumber



Dalam topik penerapan pajak progresif, Sebagai tindak lanjut rencana pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit, Mendag Thomas T. Lembong akan menemui sejumlah pihak di Perancis, termasuk parlemen Perancis. Thomas optimistis, pemerintah dan parlemen Perancis mau menjaga hubungan kerjasama perdagangan secara baik dan bersedia mengabulkan permintaan itu.

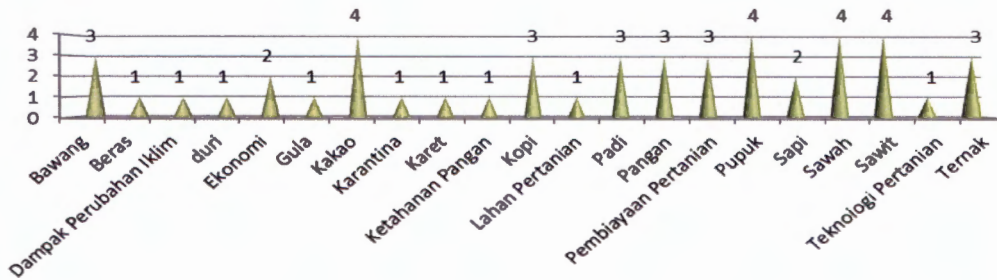
### Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 4 berita. Topik yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 13 berita (54%).



## 2.11. SELASA, 16 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 16 Februari 2016<sup>11</sup>, isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 4 berita. Topik yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif.



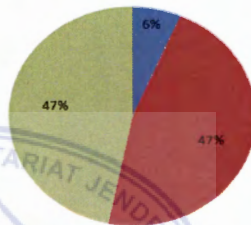
### Intisari Pemberitaan

Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap rencana pemerintah Perancis untuk menerapkan pajak progresif minyak kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia dan Malaysia. Pekan lalu, Mendag Thomas Lembong terbang ke Paris untuk bertemu dengan pejabat terkait negara Perancis guna membahas rencana kebijakan negara itu yang dapat merugikan Indonesia. **(Agro Indonesia, 16 Februari 2016)**

Permintaan Indonesia untuk membatalkan rencana pemberlakuan pajak progresif terhadap produk sawit sejauh ini direspons positif oleh Perancis. Mendag Thomas T. Lembong mengatakan pertemuannya dengan Senator Fraksi Ekologi Perancis Ronan Dantec pada Kamis (11/2) memberikan harapan bagi kelangsungan akses pasar minyak kelapa sawit di Perancis ataupun Uni Eropa. **(Bisnis Indonesia, 16 Februari 2016)**

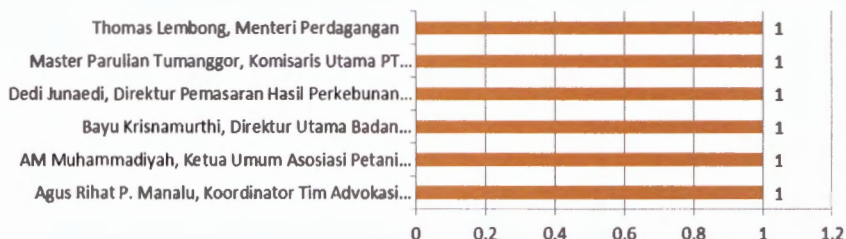
### Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 47 berita pertanian, yaitu 22 berita (47%) yang bertendensi positif, dan 22 berita (47%) bertendensi netral, sedangkan 3 berita (6%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif.



11 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

## Narasumber



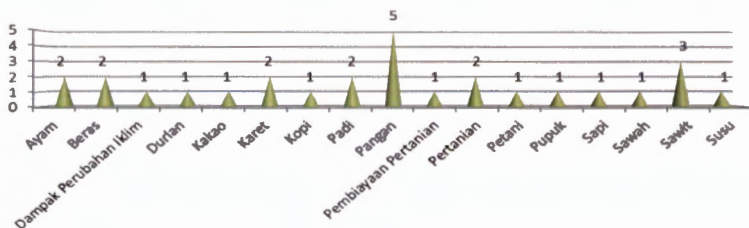
Dalam topik penerapan pajak progresif, Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap rencana pemerintah Perancis untuk menerapkan pajak progresif minyak kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia dan Malaysia. Permintaan Indonesia untuk membatalkan rencana pemberlakuan pajak progresif terhadap produk sawit sejauh ini direspons positif oleh Perancis.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 4 berita. Topik yang mengemuka adalah penerapan pajak progresif dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif dan netral sebanyak 22 berita (47%).

### 2.12. RABU, 17 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 17 Februari 2016<sup>12</sup>, Isu **pangan** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka adalah pengawasan pangan.



<sup>12</sup> 12 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



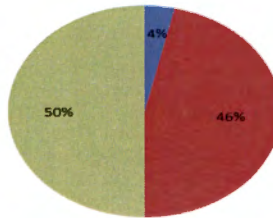
## Intisari Pemberitaan

Untuk memberantas korupsi di sektor pangan, KPK dan KPPU kini menempatkan satuan tugas di Kementan. Sektor pangan termasuk sektor yang paling rentan korupsi. Peluang korupsinya dimulai ketika dibuka jalinan kerja sama dengan rekanan. Misalnya dalam pengadaan pupuk dan lain-lain. Kehadiran KPK dan KPPU diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan kebijakan dan informasi dalam mengelola pangan. **(Kontan, 17 Februari 2016)**

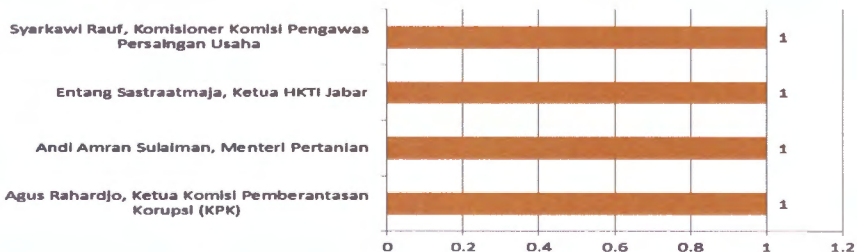
Kementan akan tegas memberantas mafia yang memainkan ketersediaan beras seiring membanjirnya stok beras di beberapa pasar induk pada musim paceklik awal tahun ini. Mentan Andi Amran Sulaiman menuturkan Pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan instansi seperti Bareskrim Polri, KPK, KPPU dan lembaga lainnya untuk memberantas mafia beras tersebut. **(Bisnis Indonesia, 17 Februari 2016)**

## Tendensi Pemberitaan

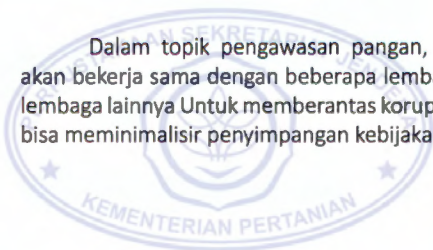
Berdasarkan 28 berita pertanian, yaitu 14 berita (50%) yang bertendensi positif, dan 13 berita (46%) bertendensi netral, sedangkan 1 berita (4%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah pengawasan pangan.



## Narasumber



Dalam topik pengawasan pangan, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakah pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan instansi seperti Bareskrim Polri, KPK, KPPU dan lembaga lainnya Untuk memberantas korupsi di sektor pangan. Kehadiran KPK dan KPPU diharapkan bisa meminimalisir penyimpangan kebijakan dan informasi dalam mengelola pangan.

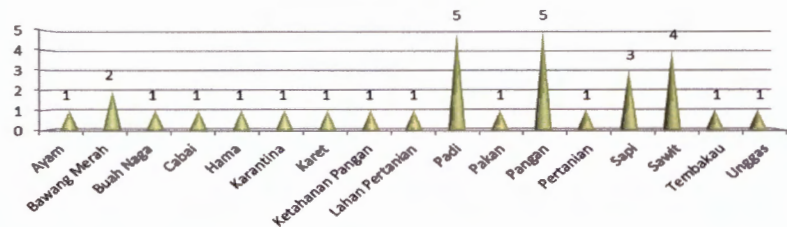


## Simpulan Pemberitaan

Isu **pangan** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka adalah pengawasan pangan dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 14 berita (50%).

### 2.13. KAMIS, 18 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 18 Februari 2016<sup>13</sup>, isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka harga pembelian pemerintah.



## Intisari Pemberitaan

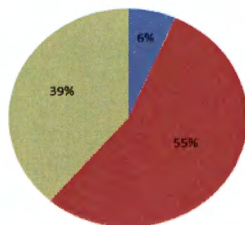
Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras pada tahun ini mengecewakan petani. Dengan harga pembelian pemerintah yang sama dengan tahun lalu itu, daya beli bisa semakin turun di tengah-tengah kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi dan sewa lahan. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertimbangannya adalah demi menjaga pasokan dan stabilitas harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, mengamankan cadangan beras pemerintah, dan menyalurkan beras untuk keperluan masyarakat. (*Kompas, 18 Februari 2016*)

Pemerintah telah menetapkan HPP untuk beras dan gabah pada tahun ini tidak berubah. Kebijakan itu, di satu sisi, diklaim untuk melindungi tingkat pendapatan petani. Namun, di lain sisi, penetapan HPP tersebut bermakna petani diminta semakin miskin untuk menjaga harga beras yang rendah ditingkat konsumen. HPP beras ditetapkan sebesar Rp7.300/kg, GKP Rp3.750/kg dan GKG Rp4.600/kg. (*Media Indonesia, 18 Februari 2016*)

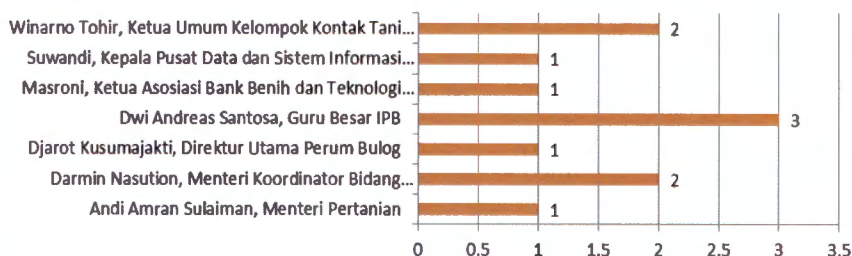
## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 31 berita pertanian, yaitu 17 berita (55%) bertendensi netral dan 12 berita (39%) yang bertendensi positif, sedangkan 2 berita (6%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka harga pembelian pemerintah.

<sup>13</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



## Narasumber



Dalam topik harga pembelian pemerintah, telah ditetapkan HPP untuk beras dan gabah pada tahun ini tidak berubah. Kebijakan itu, di satu sisi, diklaim untuk melindungi tingkat pendapatan petani. Namun, di lain sisi, penetapan HPP tersebut bermakna petani diminta semakin miskin untuk menjaga harga beras yang rendah ditingkat konsumen.

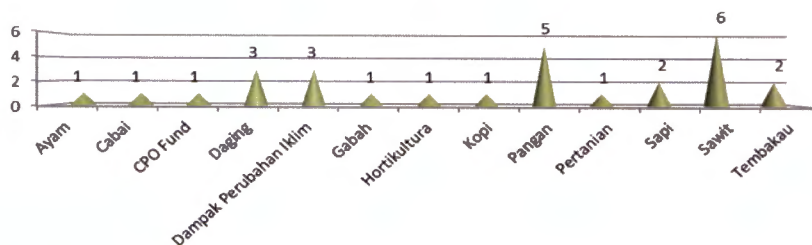
## Simpulan Pemberitaan

Isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka harga pembelian pemerintah dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 17 berita (55%).

### 2.14. JUMAT, 19 FEBRUARI 2015



Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 19 Februari 2016<sup>14</sup>, Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka kawasan ekonomi hijau CPO.



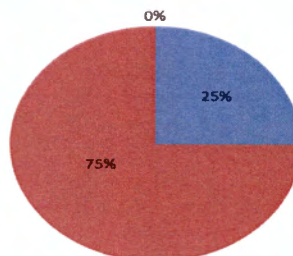
### Intisari Pemberitaan

Pemerintah menyiapkan lokasi kawasan ekonomi hijau untuk CPO mulai pertengahan 2016. Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ini dengan menggandeng pihak swasta. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengemukakan, kawasan ekonomi hijau untuk CPO akan difokuskan untuk produksi CPO beserta produk derivatif atau turunannya. **(Kompas, 19 Februari 2016)**

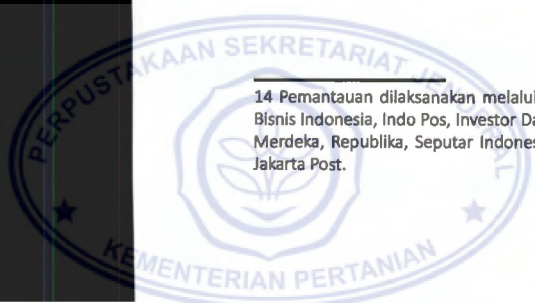
Pemerintah belum memastikan lokasi pembangunan kawasan ekonomi hijau untuk sawit (Palm Oil Green Economic Zone/POGEZ). Namun demikian, kriteria atas lokasi tersebut sudah ditetapkan, yakni dekat dengan sumber bahan baku dan memiliki infrastruktur pendukung. **(Investor Daily, 19 Februari 2016)**

### Tendensi Pemberitaan

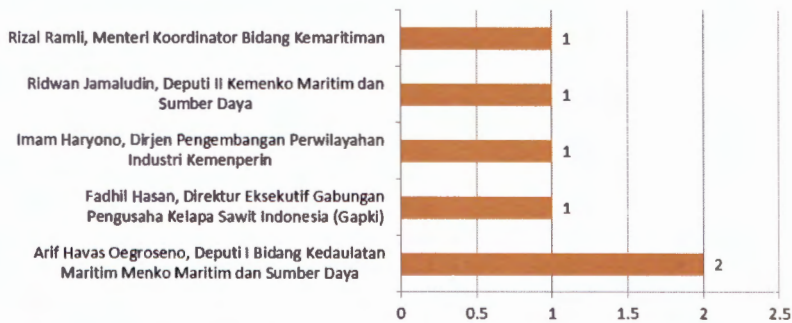
Berdasarkan 28 berita pertanian, yaitu 21 berita (75%) bertendensi netral dan 7 berita (25%) yang bertendensi positif, sedangkan tidak ada berita (0%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka kawasan ekonomi hijau CPO.



<sup>14</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



## Narasumber



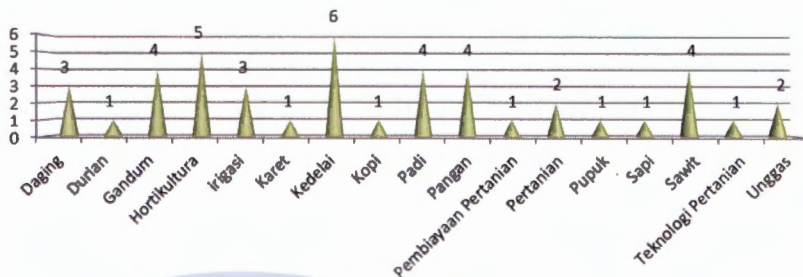
Dalam topik kawasan ekonomi hijau CPO, Pemerintah belum memastikan lokasi pembangunan kawasan ekonomi hijau untuk sawit (Palm Oil Green Economic Zone/POGEZ). Namun demikian, kriteria atas lokasi tersebut sudah ditetapkan, yakni dekat dengan sumber bahan baku dan memiliki infrastruktur pendukung. Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ini dengan menggandeng pihak swasta

## Simpulan Pemberitaan

Isu **sawit** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka kawasan ekonomi hijau CPO dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 21 berita (75%).

### 2.15. SENIN, 22 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 22 Februari 2016<sup>15</sup>, Isu **kedelai** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka rencana pembatasan impor.



15 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

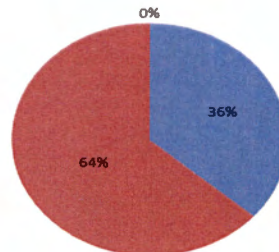
## Intisari Pemberitaan

Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerbitkan kebijakan terkait kedelai, diantaranya kewajiban importir menyerap produksi lokal. Kehati-hatian diperlukan agar kebijakan tersebut tidak malah menimbulkan gejolak harga dan mengganggu pasokan kedelai yang dikhawatirkan menyulitkan konsumen, terutama perajin tahu-tempe di dalam negeri. (*Investor Daily, 22 Februari 2016*)

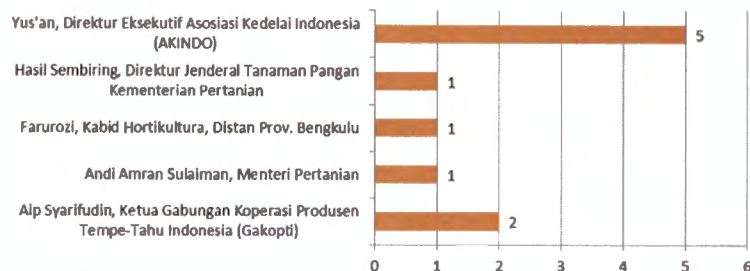
Pemerintah berencana akan membatasi impor kedelai, alasannya untuk melindungi petani dalam negeri serta menekan impor sehingga target swasembada bisa tercapai. Namun, rencana ini langsung mendapat penolakan dari Akindo dan meminta pemerintah tak terburu-buru membatasi impor kedelai karena akan merugikan pengrajin tahu-tempe. (*Kontan, 22 Februari 2016*)

## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 28 berita pertanian, yaitu 28 berita (64%) bertendensi netral dan 16 berita (36%) yang bertendensi positif, sedangkan tidak ada berita (0%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka adalah rencana pembatasan impor.



## Narasumber



Dalam topik rencana pembatasan impor, Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerbitkan kebijakan terkait kedelai yang salah satunya adalah membatasi impor kedelai, meskipun alasannya untuk melindungi petani dalam negeri. Menurut Akindo kebijakan tersebut akan merugikan pengrajin tahu-tempe.

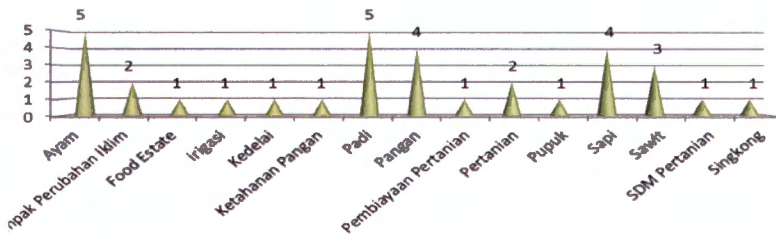


## Simpulan Pemberitaan

Isu **kedelai** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka rencana pembatasan impor dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 28 berita (64%).

### 2.16. SELASA, 23 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 23 Februari 2016, Isu ayam hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka kartel ayam.



## Intisari Pemberitaan

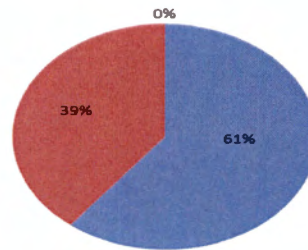
Kebijakan afkir dini *parent stock* (PS) untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan *day old chick* (DOC) sebenarnya untuk kebaikan peternak agar mendapatkan insentif dari hasil usahanya. Tapi perusahaan terintegrasi memanfaatkannya untuk menaikkan harga DOC, dengan cara memasukkan produksi DOC-nya ke kandang internal mereka. Saat peternak kesulitan mendapatkan DOC, perusahaan terintegrasi memanfaatkan situasi itu dengan menerapkan kebijakan yang disebut "kawin paksa pakan-DOC". Peternak dapat membeli DOC dengan syarat membeli pakan sebanyak 3 kg. (*Kontan*, 23 Februari 2016)

KPPU sedang mendalami dugaan kasus persekongkolan perdagangan atau kartel penjualan ayam ras di sejumlah daerah di Indonesia. Pada kasus tersebut KPPU sedikitnya memantau 12 perusahaan yang diduga melakukan praktik usaha tidak sehat. Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, untuk mencegah adanya praktik kartel, pemerintah dalam hal ini Kemendag mempunyai wewenang mengimplementasikan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (*Seputar Indonesia*, 23 Februari 2016)

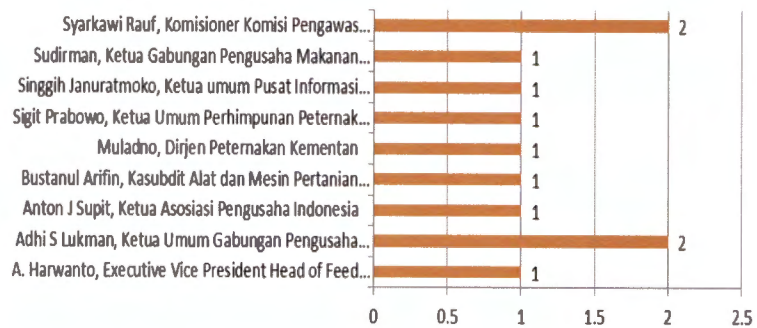
## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 33 berita pertanian, yaitu 20 berita (61%) yang bertendensi positif dan 13 berita (39%) bertendensi netral, sedangkan tidak ada berita (0%) yang bertendensi negatif. Topik netral yang mengemuka adalah kartel ayam.

16 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daiy, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



### Narasumber



Dalam topik kartel ayam, KPPU sedang mendalami dugaan kasus persekongkolan perdagangan atau kartel penjualan ayam ras di sejumlah daerah di Indonesia. Pada kasus tersebut KPPU sedikitnya memantau 12 perusahaan yang diduga melakukan praktik usaha tidak sehat.

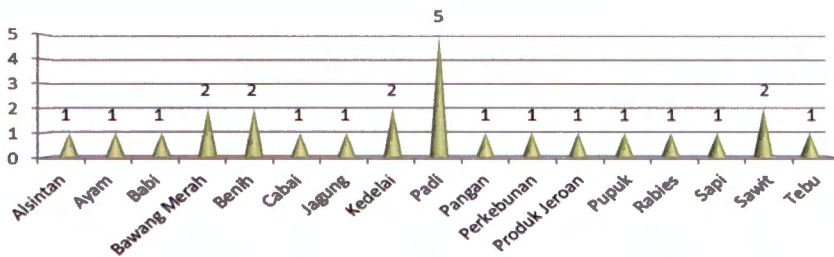
### Simpulan Pemberitaan

Isu **ayam** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka kartel ayam dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 20 berita (61%).



## 2.18. RABU, 24 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 24 Februari 2016<sup>17</sup>, Isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka kerjasama Kementan-IRRI.



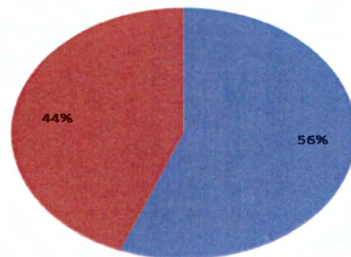
### Intisari Pemberitaan

Kementan menjalin kerjasama dengan Institut Penelitian Padi Internasional atau IRRI, organisasi non pemerintah yang berkantor pusat di Filipina. Tujuan kerja sama itu untuk meningkatkan produksi padi, baik dengan meningkatkan produktivitas padi maupun menambah frekuensi tanam, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

(Kompas, 24 Februari 2016)

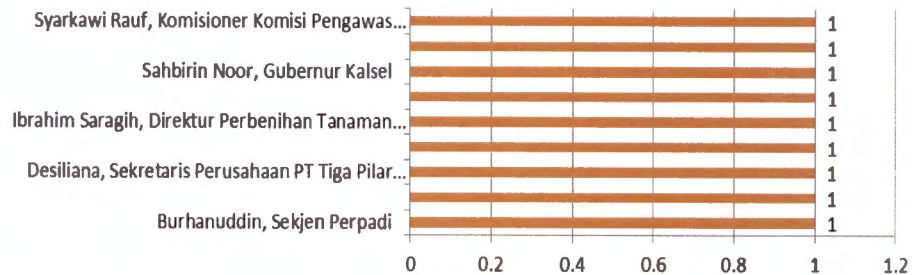
### Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 25 berita pertanian, yaitu 11 berita (44%) yang bertendensi positif dan 14 berita (56%) bertendensi netral, sedangkan tidak ada berita (0%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah kerjasama Kementan-IRRI.



<sup>17</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republik, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

## Narasumber



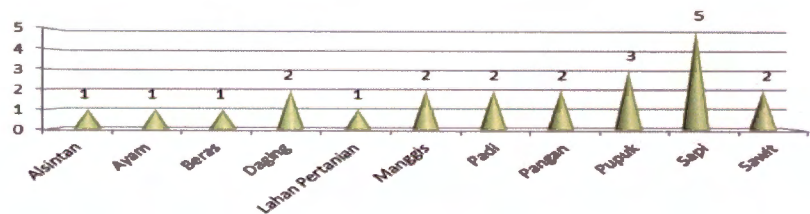
Dalam topik kerjasama Kementan-IRRI, Tujuan Kementan menjalin kerjasama dengan Institut Penelitian Padi Internasional atau IRRI adalah meningkatkan produksi padi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka kerjasama Kementan-IRRI dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah netral sebanyak 14 berita (56%).

### 2.19. KAMIS, 25 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 25 Februari 2016<sup>18</sup>, Isu **sapi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka peternakan berbasis industri.



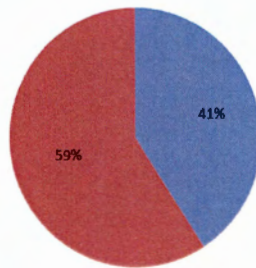
18 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

## Intisari Pemberitaan

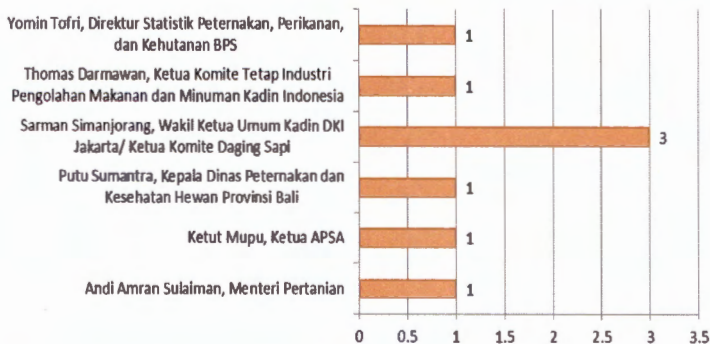
Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang menyebut harga daging sapi masih bertengger di Rp110 ribu-Rp115 ribu/kg. Sarman mengatakan persoalan dasar gejala harga daging sapi ialah tidak adanya pasokan melimpah di pasar. Ia mempertanyakan data pasokan sapi yang disebut selalu cukup oleh Kementan, tapi faktanya tidak ada di pasar. Menurut dia, jumlah sapi lokal yang merupakan sapi peternakan rakyat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Swasembada daging sapi yang diimpikan pemerintah, dinilainya harus diupayakan lewat skema peternakan berbasis industri. **(Media Indonesia, 25 Februari 2016)**

## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 22 berita pertanian, yaitu 13 berita (59%) yang bertendensi positif dan 9 berita (41%) bertendensi netral, sedangkan tidak ada berita (0%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah peternakan berbasis industri.



## Narasumber



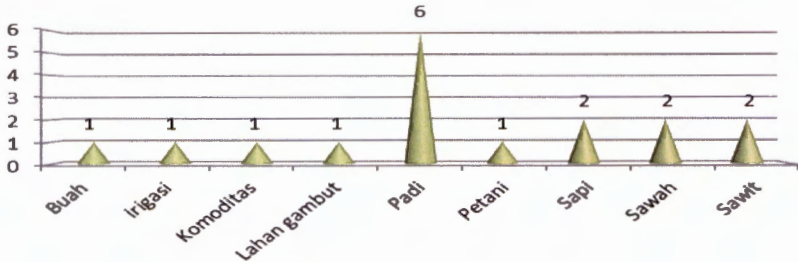
Dalam topik peternakan berbasis industri, Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang mempertanyakan data pasokan sapi yang disebut selalu cukup oleh Kementan, tapi faktanya tidak ada di pasar. Swasembada daging sapi yang diimpikan pemerintah, dinilainya harus diupayakan lewat skema peternakan berbasis industri.

## Simpulan Pemberitaan

Isu sapi hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 5 berita. Topik yang mengemuka peternakan berbasis industri dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 13 berita (59%).

## 2.19. JUMAT, 26 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 26 Februari 2016<sup>19</sup>, Isu **padi** hadir sebagai topik, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka harga beras.



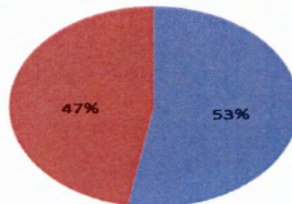
### Intisari Pemberitaan

Pernyataan harga beras di Indonesia termahal di dunia adalah tidak benar, hal ini diterangkan oleh Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. Harga beras yang saat ini telah ditetapkan Pemerintah melalui HPP sebesar Rp7.300/kg, dengan harga tertinggi sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 di PIBC adalah Rp13.500/kg. Kementan telah membuktikan dengan melakukan survei ke negara Vietnam. Harga beras terendah di tingkat konsumen adalah Rp6.097/kg dan harga tertinggi mencapai Rp18.292/kg. **(Suara Pembaruan, 26 Februari 2016)**

Kementan mengklaim harga beras di Indonesia pada musim paceklik saat ini relatif stabil, bahkan diklaim lebih murah ketimbang harga beras di negara eksportir beras, seperti Vietnam, Thailand dan India. Mentan Amran Sulaiman menyebut HPP sebesar Rp7.300/kg, rata-rata harga beras hanya Rp10.400/kg dan lebih rendah dari negara eksportir. **(Kontan, 26 Februari 2016)**

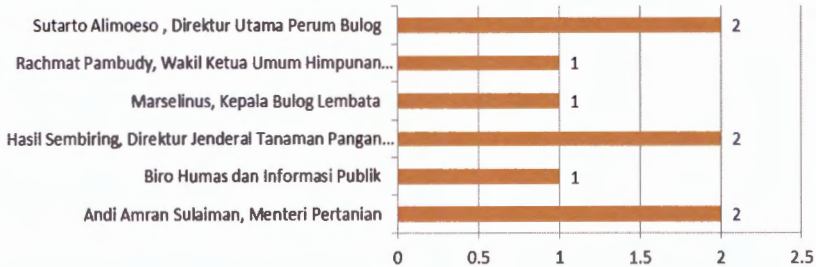
### Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 17 berita pertanian, yaitu 8 berita (47%) yang bertendensi positif dan 9 berita (53%) bertendensi netral, sedangkan tidak ada berita (0%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah harga beras.



19 Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.

## Narasumber



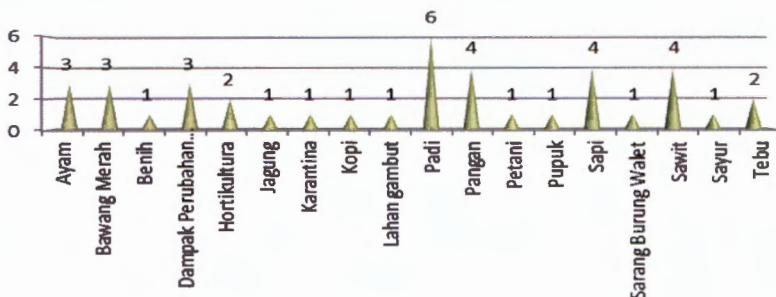
Dalam topik harga beras, Kementan mengklaim harga beras di Indonesia pada musim paceklik saat ini relatif stabil, bahkan diklaim lebih murah ketimbang harga beras di negara eksportir beras, seperti Vietnam, Thailand dan India. Mentan Amran Sulaiman menyebut HPP sebesar Rp7.300/kg, rata-rata harga beras hanya Rp10.400/kg dan lebih rendah dari negara eksportir.

## Simpulan Pemberitaan

Isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka harga beras dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 8 berita (53%).

## 2.20. SENIN, 29 FEBRUARI 2016

Berdasarkan telaahan terhadap pemberitaan, 29 Februari 2016<sup>20</sup>, Isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka stok beras aman.



<sup>20</sup> Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan "Kliping Berita Pertanian" dengan menelaah 19 media cetak, yaitu Kompas, Bisnis Indonesia, Indo Pos, Investor Daily, Jurnal Nasional, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Seputar Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan, Agro Indonesia, Sinar Tani, dan The Jakarta Post.



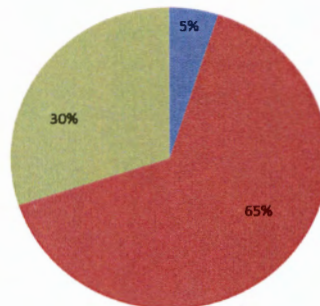
## Intisari Pemberitaan

Kementan memastikan bahwa stok beras akan aman hingga empat bulan kedepan. Karena saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen. Bahkan Kementan akan menggelar panen raya serentak di tujuh provinsi. Karena itu, Kementan mengharapkan Bulog segera menyerap gabah langsung ke petani. Hal ini dilakukan guna mencegah harga gabah petani anjlok. **(Suara Karya, 29 Februari 2016)**

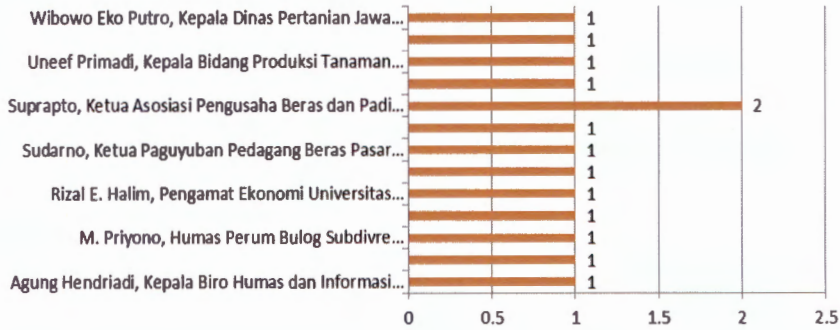
Masih berlangsungnya musim paceklik di bulan ini tidak membuat stok dan pasokan beras di pasar berkurang. Faktanya, justru stok pasar melimpah. Pasar merespons kejadian el-nino ini dengan berbagai perilaku dan indikasinya terlihat dari harga beras pada Desember-Januari cenderung naik, tetapi secara tiba-tiba di minggu kedua Februari turun signifikan. **(Suara Pembaruan, 29 Februari 2016)**

## Tendensi Pemberitaan

Berdasarkan 40 berita pertanian, yaitu 12 berita (30%) yang bertendensi positif dan 26 berita (65%) bertendensi netral, sedangkan 2 berita (5%) yang bertendensi negatif. Topik positif yang mengemuka adalah stok beras aman.



## Narasumber



Dalam topik stok beras aman, Kementan memastikan bahwa stok beras akan aman hingga empat bulan kedepan. Karena saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen. Bahkan Kementan akan menggelar panen raya serentak di tujuh provinsi.

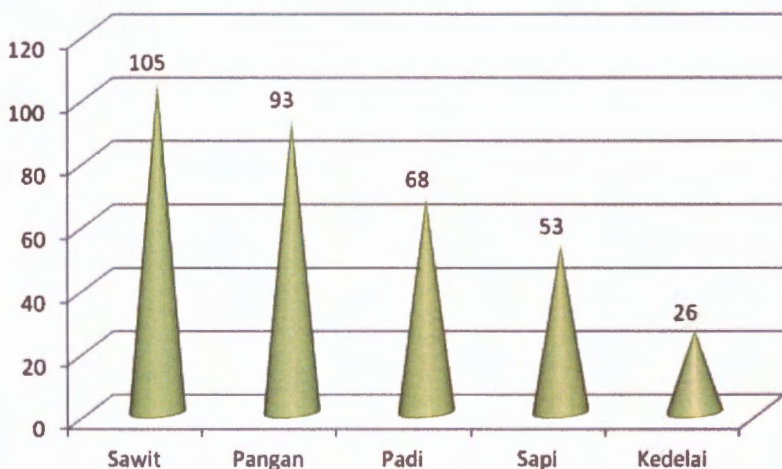
## Simpulan Pemberitaan

Isu **padi** hadir sebagai top isu, yakni sebanyak 6 berita. Topik yang mengemuka stok beras aman dengan tendensi pemberitaan terbanyak pada hari adalah positif sebanyak 12 berita (30%).



## 3. SIMPULAN TELAAHAN TREN ISU

### 3.1 TOP ISU PERTANIAN



Berdasarkan Telaahan Tren Isu selama periode bulan Februari 2016, topik-topik pertanian yang paling mengemuka dari 695 berita dan opini adalah:

#### 1. Pajak Sawit Perancis

Pemerintah Prancis berencana memberlakukan peraturan terkait pungutan pajak regresif terhadap crude palm oil (CPO). Merespons hal tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah mengadakan negosiasi untuk membatalkan aturan tersebut. Pemberlakuan pajak Prancis harus dicegah sebab akan sangat merugikan petani sawit di Indonesia. Peraturan pajak tersebut juga dinilai tidak masuk akal, mengada-ada, dan bentuk penjajahan gaya baru. Karena itu, pemerintah Indonesia memohon pembatalan rencana pemberlakuan pajak progresif terhadap produk sawit, yang sejauh ini direspons positif oleh Perancis. Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengatakan pertemuannya dengan Senator Fraksi Ekologi Prancis Ronan Dantec memberi harapan bagi kelangsungan akses pasar minyak kelapa sawit di Prancis ataupun Uni Eropa.

#### 2. Tata Niaga Pangan

Panjang dan kusutnya rantai pasokan diyakini menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga pangan di Indonesia. Pemerintah pun akan melibatkan lebih banyak pihak untuk memangkas rantai tersebut. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, untuk jalur rantai pasokan beras, pihaknya mengusulkan dipangkas menjadi empat titik. Dari petani ke Bulog, Bulog ke pasar, lalu ke konsumen.



### 3. Tata Niaga Beras

Kementerian Pertanian (Kementan) akan tegas memberantas mafia yang memainkan ketersediaan beras seiring membanjirnya stok beras di beberapa pasar induk pada musim paceklik awal tahun ini. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menuturkan sedari awal pihaknya sudah mencurigai ada mafia yang mengeluarkan semua stok beras dari hasil pengendapannya selama musim el-nino terjadi pada tahun lalu.

### 4. Distribusi Sapi Ternak

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kapal ternak berhasil membawa muatan penuh 299 ekor sapi karena pihaknya kini menggandeng 13 perusahaan untuk mengisi muatan. Jadi, pemerintah tidak melakukan pembelian sapi secara langsung ke peternak. Dengan kerja sama itu, Mentan menerangkan, pihaknya mendapatkan jaminan dari 13 perusahaan tersebut, kapal ternak akan memasok 1.000 ekor sapi per bulannya.

### 5. Pembatasan Impor Kedelai

Pemerintah berencana membatasi impor kedelai dengan alasan melindungi petani dalam negeri serta menekan impor, sehingga target swasembada bisa tercapai. Namun, rencana ini langsung mendapat penolakan dari Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) dan meminta pemerintah tak terburu-buru membatasi impor kedelai karena akan merugikan pengrajin tempe dan tahu. Mereka membutuhkan pasokan 1,8 juta ton kedelai per tahun. Sekedar gambaran, menurut data BPS pada tahun 2015 lalu impor kedelai Indonesia mencapai 2,3 juta ton, dan produksi dalam negeri hanya sebesar 983.000 ton.

## 3.2 Simpulan

- Berdasarkan Telaahan Tren Isu selama periode bulan Februari 2016, isu-isu pertanian yang mengemuka adalah: (1) pajak sawit Perancis (2) tata niaga pangan, (3) tata niaga beras, (4) distribusi sapi ternak, dan (5) pembatasan impor kedelai
- Isu "sawit" hadir mengemuka sebanyak 105 berita. Topik yang mengemuka adalah pajak sawit Perancis
- Pajak CPO yang diatur dalam Amandemen No 367 seperti yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Legislatif Prancis dianggap telah melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan DUnia (WTO) dan the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994.

